

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

implementasi UU No 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan Pada dinas pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi, dapat dijawabarkan sebagai berikut: (a) Ukurab dan Tujuan kebijakan, yaitu: 1) sosialisasi kebijakan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi. 2) rapat koordinasi pelaksanaan undang-undang pemajuan kebudayaan baik tingkat Dinas, Organisasi seni dan budaya, serta pelaku seni dan budaya. (b) Sumberdaya, dalam hal ini implementasi UU No 5 Tahun 2017 2017 tentang pemajuan kebudayaan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi, dijabarkan sebagai berikut: 1) sumber daya manusia yang handal dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan 2) anggaran yang memadai dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan 3) sarana dan prasana yang menunjang program pemajuan kebudayaan. c) Karakteristik Agen pelaksana, meliputi: 1) rencana program seni budaya yang terdata terstruktur dan terjadwal. 2) rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 3) SOP dan petunjuk teknis pemajuan kebudayaan. (d) Adanya Sikap Kecenderungan (Disposisi) para pelaku meliputi: 1) koordinasi Dinas dengan Organisasi budaya dan pelaku seni dan budaya. 2) monitoring dan evaluasi pelaksana pemajuan kebudayaan 3) kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan (e) Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksana, terdiri atas 1) media informasi tentang kegiatan pemajuan kebudayaan (website,facebook,instagram,twitter dan sebagainya). 2) temu pelaku seni budaya 3) koordinasi antar stakeholder seni budaya, dan (f) Lingkungan Sosial ekonomi Politik, terdiri atas: 1) kalender kegiatan seni budaya di kota 2) pemberdayaan seni budaya di bidang pendidikan,dunia usaha dan dunia industri 3) program Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha dan dunia industri

Hambatan - hambatan dalam implementasi undang – undang no 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan pada dinas pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi, meliputi: (1) Pelaksanaan Sossialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang masih belum optimal. (2) Keterbatasan

Anggaran dalam rangka pelaksanaan pemajuan kebudayaan. (3) Kurangnya Infrastruktur pendukung pelaksanaan pemajuan kebudayaan Fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan kebudayaan, seperti museum, gedung kesenian, dan ruang publik untuk acara budaya, mungkin tidak memadai atau kurang terawat (4) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten (5) Minimnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. (6) Birokrasi dan Regulasi yang Kompleks. (7) Kurangnya Kerjasama Antarlembaga. (8) Globalisasi dan Pengaruh Budaya Asing, dan (9) Aksesibilitas.

Strategi/upaya yang dilakukan dalam peningkatan implementasi UU no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan, meliputi (1) Penguatan Kebijakan dan Regulasi (2) Peningkatan Kapasitas SDM (3) Penguatan Infrastruktur Kebudayaan (4) Pendanaan yang Berkelanjutan (5) Pemberdayaan Komunitas dan Pelaku Budaya (6) Promosi dan Publikasi (7) Monitoring dan Evaluasi

Penelitian ini berfokus pada implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum Rakyat di Republik Bekasi. Ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi, termasuk hak untuk memilih, hak untuk pendidikan, hak atas pendidikan, karakteristik agensi pemerintah, penghapusan limbah, komunikasi antara organisasi dan kegiatan, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Adapun kesimpulan dari pembahasan, antara lain:

1. Pentingnya aspek sosial dan budaya dalam implementasi hukum. Aspek sosial dan budaya sangat penting untuk memastikan implementasi hukum. Aspek sosial dan budaya meliputi hubungan antara pemerintah dan rakyat, hubungan pemerintah dengan rakyat, dan hubungan antara pemerintahan dan rakyat. Hubungan antara pemerintah dan rakyat sangat penting untuk keberhasilan hukum. Studi ini juga membahas pentingnya peran pemerintah dalam implementasi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi undang-undang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peran pemerintah dalam proses implementasi, peran pemerintah pada proses implementasinya, dan aspek sosial dan budaya.

2. Sumber daya manusia sangat penting dalam implementasi program budaya, karena mereka sering diabaikan dalam proses dan dapat merugikan kesuksesan keseluruhan program. Studi yang dilakukan tentang program budaya di bawah Undang-Undang Indonesia No. 5 tahun 2017 menemukan bahwa sumber daya yang ditugaskan untuk program budaya seringkali tidak mencukupi, yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam program. Studi ini juga membahas pentingnya sumber daya dalam implementasi program budaya, menyatakan bahwa sumber daya yang ditugaskan untuk program budaya harus cukup dan cukup untuk memastikan keberhasilan program. Peran lembaga-lembaga budaya dalam implementasi program budaya, menekankan pentingnya program budaya yang terstruktur dan terstruktur dengan baik, departemen budaya dengan baik dan struktur organisasi dengan baik.
3. Pentingnya warisan budaya untuk pelaksanaan inisiatif pariwisata warisan. Ia menekankan perlunya program pariwisata warisan budaya dan program warisan kebudayaan yang terorganisir dan tepat waktu. Kebijakan Warisan Budaya (CDP) dimasukkan ke dalam program, yang didasarkan pada warisan budaya lokal. Kebijakan Warisan Budaya (CDP), yang didasarkan pada Undang-Undang warisan budaya tahun 2017, digunakan untuk menerapkan program ini. Komponen tambahan dari program ini adalah Kebijakan Warisan Budaya, yang didasarkan pada Undang-Undang Warisan Kebudayaan 2017. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjamin efektivitas inisiatif pariwisata warisan budaya. Promosi kebudayaan regional melalui implementasi kegiatan kebudayaan dan tiap kebudayaan pelestarian adalah peran komite kebudayaan daerah.
4. Komunikasi antara organisasi dan kegiatan Prosedur adalah bagaimana informasi ditransfer dari media komunikasi ke penyedia informasi sehingga penyediaan informasi dapat memahami apa yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan untuk memulai permintaan informasi. Komunikasi yang efektif sangat menghalangi implementasi kebijakan untuk anak-anak prasekolah di kota untuk mendorong kerja sama tim antara siswa dan guru. Media informasi terdiri dari media komunikasi dan media berita, yang merupakan dua sumber

utama informasi. Koordinasi Mengatasi masalah lingkungan eksternal yang menghalangi hasil kesehatan masyarakat diperlukan untuk implementasi inisiatif kesehatan masyarakat. Mencapai hasil kesehatan masyarakat dapat sulit dihadapan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang tidak konduktif. Indikator seperti kalender budaya distrik Bekasi, kehadiran keragaman budaya dalam bisnis dan industri, dan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sektor-sektor ini semua harus diperhitungkan untuk menjamin implementasi yang sukses. Memahami penggunaan Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dibantu oleh indikator-indikator ini.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini penenliti memberikan saran yang menjadi langkah terakhir dalam penulisan dari hasil penelitian ini dan beragam informasi yang sudah didapat, maka peneliti mempunyai bebebrapa saran antara lain:

1. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia memegang peran vital dalam implementasi program budaya karena mereka adalah penggerak utama yang membawa nilai-nilai dan praktik budaya ke dalam kehidupan organisasi. Tanpa dukungan dan keterlibatan penuh dari setiap individu dalam organisasi, program budaya hanya akan menjadi sekadar dokumen tanpa makna. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan Sumber daya manusia sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program budaya, memastikan bahwa mereka memahami dan mendukung tujuan dari program tersebut. Pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memperkuat kompetensi karyawan dalam menerapkan nilai-nilai budaya organisasi dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, kepemimpinan yang kuat harus hadir untuk memberikan contoh dan memotivasi sumber daya manusia dalam menjalankan program budaya secara konsisten. Dengan demikian, integrasi yang efektif antara sumber daya manusia dan program budaya akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif, mendukung pencapaian tujuan strategis suatu kegiatan.
2. Pentingnya Komunikasi. Komunikasi merupakan elemen fundamental dalam setiap aspek kehidupan, baik di ranah personal maupun profesional. Melalui

komunikasi yang efektif, kita dapat menyampaikan ide, mengekspresikan perasaan, dan membangun hubungan yang kokoh dengan orang lain. Pada sebuah organisasi/instansi, komunikasi yang baik memungkinkan kolaborasi yang lebih efisien, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan produktivitas tim. Di lingkungan sosial dan keluarga, komunikasi yang jujur dan terbuka menciptakan kepercayaan dan pengertian, yang menjadi landasan bagi hubungan yang harmonis. Selain itu, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik juga membantu kita menghadapi konflik dengan lebih konstruktif, memungkinkan penyelesaian masalah secara damai dan solutif. Oleh karena itu, mengasah keterampilan komunikasi adalah investasi penting yang membawa dampak positif bagi berbagai aspek kehidupan kita.